

STRATEGI PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

¹Elisabeth Novianti Kuki; ²Dr.Dra.Endang Try Setyasih,MM
NPP. 31.0775

*Asdaf Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: elisabethnovy17@gmail.com ddjoher@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem that occurred in Sikka Regency, East Nusa Tenggara, namely the low representation of women in politics, especially in the Sikka Regency DPRD. **Objective:** The purpose of this research is to determine the strategy of political parties to increase women's representation in the DPRD of Sikka District, East Nusa Tenggara Province. **Methodology:** This research uses a qualitative descriptive approach and analysis of ASOCA strategies according to Ermaya Suradinata. Data collection techniques were conducted by in-depth interviews (6 informants), observation and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are that women's representation in the Sikka district parliament has various obstacles caused by internal and external factors so that it requires maximum efforts from political parties in the Sikka district area. **Conclusion:** The strategy of political parties to increase women's representation in the Sikka District Parliament has been well implemented, but it needs to be optimized so that the target to achieve 30% female representation in parliament can be realized.

Keywords: Women's Representation, Legislative Elections, Political Parties

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yaitu rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di DPRD Kabupaten Sikka. **Tujuan:** Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis terhadap strategi ASOCA menurut Ermaya Suradinata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (6 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Sikka memiliki berbagai hambatan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sehingga membutuhkan upaya yang maksimal dari partai politik di wilayah kabupaten Sikka. **Kesimpulan:** Strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi perlu untuk dioptimalkan sehingga target untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di parlemen dapat terwujud.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Legislatif, Partai Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik tidak terlepas dari budaya patriarki yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Status perempuan seolah tidak terlepas dari perannya dalam keluarga, sehingga tidak layak muncul asumsi bahwa sosok laki-laki lebih layak untuk menempati posisi-posisi dalam ranah politik. Tantangan yang dihadapi perempuan yang terlibat aktif dalam bidang politik seringkali tidak cukup untuk menghindari ancaman diskriminasi dan marginalisasi.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam politik dengan menerbitkan sejumlah kebijakan. Salah satu kebijakan yang dicetuskan adalah kebijakan afirmatif tentang kuota 30% keterwakilan perempuan di bidang politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 173 ayat (2) yang menjadi angin segar bagi kaum perempuan. Hal tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki. Kebijakan ini juga dipahami sebagai solusi yang bertujuan mendorong kaum perempuan menduduki kursi di lembaga legislatif.

Partai politik sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dibentuk atas dasar kesamaan kehendak, cita-cita serta tujuan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi partai politik dari negara demokrasi ditunjukkan dengan adanya fungsi dan peran dari partai politik dalam membantu meningkatkan partisipasi politik melalui fungsi partai politik sebagai: 1). Sebagai komunikasi politik, 2). Sebagai sarana sosialisasi politik, 3). Sarana rekrutmen politik, 4). Sebagai sarana pengatur konflik. (Budiardjo 2008).

Permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya dihadapi di tingkat pusat namun juga sama halnya di tingkat daerah. Tingkat keterwakilan perempuan di daerah belum mencapai 30%. Kondisi ini tentu memerlukan tindakan solutif untuk mengimplementasikan kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sebab jika tidak segera dicarikan solusinya, maka dinamika politik lokal yang berkembang saat ini bisa terdistorsi seiring meningkatnya perhatian dan reaksi masyarakat terhadap politik daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dibentuk atas dasar kesamaan kehendak, cita-cita serta tujuan. Fungsi partai politik dari negara demokrasi ditunjukkan dengan adanya fungsi dan peran dari partai politik dalam membantu meningkatkan partisipasi politik melalui fungsi partai politik sebagai: 1). Sebagai komunikasi politik, 2). Sebagai sarana sosialisasi politik, 3). Sarana rekrutmen politik, 4). Sebagai sarana pengatur konflik. (Budiardjo 2008).

Partai politik dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan dengan memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat umum sehingga mereka menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik individu dan kelompok. Pendidikan

politik dilakukan untuk membuat orang menjadi warga negara yang sadar diri, memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Pendidikan partai politik dapat berupa pelatihan, bantuan, seminar, lokakarya, pertunjukan seni dan budaya, dokumenter, komposisi, dan pelatihan dan bimbingan teknis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang telah penulis lakukan. Selain itu, penelitian dahulu dapat membantu mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang membahas terkait strategi partai politik, kinerja partai politik dan pengimplementasian fungsi partai politik.

Pertama (Loisa, 2023). *Strategi Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Ngada Pada Pemilu 2024 (Studi Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)*. Penelitian ini membahas terkait strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada. Partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional dibentuk atas dasar kesamaan kehendak, cita-cita serta tujuan. Fungsi partai politik dari negara demokrasi ditunjukkan dengan adanya fungsi dan peran dari partai politik dalam membantu meningkatkan partisipasi politik melalui fungsi partai politik sebagai: 1). Sebagai komunikasi politik, 2). Sebagai sarana sosialisasi politik, 3). Sarana rekrutmen politik, 4). Sebagai sarana pengatur konflik.

Kedua, (Yonike, 2023) *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah*. Hasil dari penelitian ini adalah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) bagi penduduk suku Moni yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai menghadapi berbagai faktor diantaranya Ada beberapa faktor dalam masyarakat yang mempersulit proses pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), yaitu masih kurangnya pemahaman tentang administrasi kependudukan dan kepercayaan terhadap isu Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang dihubungkan-hubungkan dengan hal-hal yang tidak benar.

Ketiga, (Hafidh, 2023) *Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Studi Kasus Desa di Kabupaten Nganjuk)*. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menghambat Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait masalah administrasi, masih belum merata fasilitas yang diberikan pemerintah daerah terkait mobil siaga desa dan juga banyak fasilitas desa yang sudah rusak karena kurang adanya perawatan serta keterbatasan anggaran di desa sehingga perangkat desa harus mencari tambahan

Keempat, (Madur, 2022) *Politik Dan Perempuan (Studi Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)*. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya keterwakilan Perempuan dalam pemilihan umum legislative tahun 2019 di Kabupaten Ngada disebabkan oleh faktor budaya, kondisi social dan ekonomi para politisi Perempuan, rendahnya motivasi pribadi dan rendahnya peran partai politik dalam pencapaian keterwakilan perempuan dalam kegiatan pemilu legislative tahun 2019 serta partai politik perlu membuat terobosan dalam pola rekrutmen dan kaderisasi anggota partai perempuan.

Kelima, (Yuni dkk. 2019) *Formulasi strategi partisipasi politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2019*. Hasil Penelitian peningkatan kuota keterwakilan Perempuan di arena politik merupakan perwujudan dari implementasi kebijakan afirmatif, Kebijakan ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan kerja sama pemerintah, partai politik, lembaga pemilihan, masyarakat pemilih dan calon legislatif Perempuan serta dibutuhkan tahapan penyusunan strategi partisipasi partai politik yang menyeluruh guna meningkatkan kuota keterwakilan perempuan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pembahasan dan konsep yang digunakan. Pembahasan pada penelitian ini lebih berfokus kepada strategi partai politik di wilayah Kabupaten Sikka untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dianalisis dengan menggunakan Teori strategi ASOCA (Ermaya Suradinata, 2013), penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal berikut. Pertama, Strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka. Kedua faktor penghambat partai politik dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka. Ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2020:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memotret keadaan alamiah dan kondisi alamiah suatu masalah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk memperoleh data secara aktual dari lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi dengan jumlah responden sedikit karena peneliti ingin memperoleh pengetahuan tentang peristiwa secara mendalam (Sugiyono, 2020 : 195). Penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan diantaranya Ketua KPU Kabupaten Sikka, Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia, Ketua DPD Partai Golongan Karya, Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Sikka dan peserta pemilu. Observasi yang dilakukan adalah mengambil data geografis, demografis, sosial ekonomi, visi misi dan struktur organisasi. Teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014:246).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan teori ASOCA menurut Ermaya Suradinata, yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu *ability, strengths, opportunities, culture dan agility*.

3.1. Strategi Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka

Strategi yang digunakan oleh penulis sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka. Adapun analisis keadaan yang dijelaskan oleh penulis merupakan analisis ASOCA (*ability, strenght, opportunity, culture, dan agility*). Penulis menggunakan analisis ASOCA sebagai landasan dalam menentukan strategi.

A.Ability (Kemampuan)

Ability yaitu analisis kemampuan yang melibatkan kekuatan dan pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia yang memungkinkan institusi tersebut memperoleh nilai tambah yang bermanfaat atau menguntungkan partai politik dalam mencapai visi dan misi, tujuan serta sasaran. Yang diperlukan dalam analisis ini adalah setiap perusahaan dan organisasi harus menilai kekuatan dan kelemahannya. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis telah melakukan wawancara dengan para pemimpin partai terkait kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini calon legislatif perempuan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan baik di partai politik maupun parlemen di Kabupaten Sikka

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk dimanfaatkan dalam rangka pencapaian suatu tujuan dalam hal ini adalah ketertarikan atau minat Perempuan untuk terlibat dalam politik

b. Ketersediaan Dana/Anggaran

Kondisi ekonomi biasanya menggambarkan keadaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu komunitas berdasarkan aktivitas ekonomi, pendapatan pekerjaan dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, sangat penting bagi politisi perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu legislatif untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa calon legislatif harus mengeluarkan sejumlah besar dana untuk setiap tahapan pemilu mulai dari biaya pendaftaran peserta pemilu, biaya kampanye sampai pada biaya pencoblosan.

B. Strength (Kekuatan)

Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka maka partai politik harus memiliki kekuatan regulasi sebagai dasar dalam melakukan peran dan fungsinya. Selain itu, partai politik juga harus memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tujuan partai dapat tercapai

a. Regulasi/Kebijakan

Dalam rangka mengakomodir seluruh kebutuhan warga negara termasuk kaum perempuan, maka pemerintah telah mengatur kebijakan terkait kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% sebagai prasyarat dalam mengikuti pemilihan umum.

b. Komitmen Instansi (Partai Politik)

Partai politik adalah sebuah kelompok yang dapat terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama dengan suatu tujuan memperoleh kekuasaan politik dan juga merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo). Partai politik memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai sarana pencapaian tujuan dari anggotanya, sebagai wadah rekrutmen politik untuk memenuhi berbagai tugas dalam sistem politik dan juga wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat umum. Ditinjau dari fungsinya, partai politik memiliki tugas yang sangat krusial

dalam mempersiapkan calon legislatif perempuan untuk bertarung dalam pemilihan umum legislatif.

C. Opportunities (Peluang)

Opportunity (O), yaitu analisis peluang, keadaan atau kondisi yang merupakan peluang di luar partai politik dan memberikan peluang bagi partai untuk berkembang di masa depan. Caranya adalah dengan mencari peluang atau fitur itu dapat mengarah pada perkembangan organisasi di masa depan atau dalam waktu dekat yaitu dengan melakukan kerja sama beberapa pihak untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik. Di kabupaten Sikka, partai politik telah melakukan berbagai sosialisasi terkait kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam politik bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Komisi Pemilihan Umum.

D. Culture (Budaya)

Culture (budaya) yaitu kondisi sistem dan budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hasil dari wawancara penulis berkaitan dengan jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sikka, beberapa anggota masyarakat perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa kaum perempuan di Kabupaten Sikka cenderung memilih untuk melakukan pekerjaan yang ringan seperti pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor yang bersifat administrasi dibandingkan dengan pekerjaan berat seperti memasuki dunia politik.

Hal ini tidak lepas dari sistem budaya Patriarki di wilayah Kabupaten Sikka, dimana istilah patriarki mengacu pada suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam peran kepemimpinan, otoritas moral dan hak sosial. Sementara budaya patriarki mengacu pada suatu sistem kebudayaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang dalam kekuasaan dan mendominasi pada status sosial, hak-hak sosial pada suatu wilayah tertentu.

E. Agility (Kecerdasan)

Dari segi kompetensi, partai politik memiliki kriteria dasar yang harus dimiliki anggota partai perempuan yaitu kemampuan berorganisasi, kemampuan bersosialisasi dan nilai kepemimpinan dasar yang memadai. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan anggota partai perempuan menjadi wakil rakyat sekaligus pemimpin yang berkualitas. Melalui proses kaderisasi, partai politik mendapatkan anggota yang mampu berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum.

Pada dasarnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sikka. Namun kenyataannya, persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Sikka belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik di wilayah Kabupaten Sikka belum optimal.

3.2. Faktor Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka

Strategi Partai Politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka masih banyak menemukan hambatan-hambatan ataupun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan yaitu:

1. Ketertarikan Perempuan pada Politik

Ketertarikan atau minat perempuan dalam memasuki dunia politik merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri. Memiliki rasa tertarik pada politik merupakan indikator utama yang menjadi penggerak bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam politik.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh selama penelitian, pemahaman bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Sikka khususnya kaum perempuan tidak memiliki antusiasme atau ketertarikan dengan dunia politik, apalagi menjadi anggota legislatif. Hal tersebut tidak lepas dari sistem budaya patriarki yang masih terpelihara. Oleh sebab itu, rendahnya keterwakilan

perempuan di bidang politik di Kabupaten Sikka adalah hal yang wajar karena kaum perempuan tidak memiliki minat pada politik, walaupun pada dasarnya kehadiran perempuan dan laki-laki dalam politik sama pentingnya. Selain itu pandangan-pandangan yang mengharuskan perempuan untuk mengatur rumah tangganya saja juga menjadi indikator yang membuat keterwakilan perempuan di Kabupaten Sikka belum memenuhi target yang ditentukan. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka harus membuat pikiran kita terbuka untuk menyadari pentingnya kedudukan perempuan di parlemen.

2. Kemampuan Ekonomi Politisi Perempuan di Kabupaten Sikka

Fakta bahwa calon legislatif harus mengeluarkan sejumlah besar dana untuk setiap tahapan pemilu mulai dari biaya pendaftaran peserta pemilu, biaya kampanye sampai pada biaya pencoblosan menjadi salah satu hambatan bagi calon anggota legislatif perempuan. Sebagai calon anggota legislatif, kondisi ekonomi dan status dalam keluarga merupakan hambatan yang cukup besar bagi partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan di Kabupaten Sikka karena para calon legislatif perempuan dihadapkan pada pilihan yaitu mengeluarkan biaya untuk kepentingan pemilihan umum atau kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa keterbatasan biaya dari para politisi perempuan menjadi salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka. Para calon legislatif perempuan lebih memilih untuk tidak mengeluarkan biaya bagi kegiatan pemilu karena tanggungjawab rumah tangga yang mereka emban.

3. Proses Rekrutmen oleh Partai Politik

Rekrutmen partai politik merupakan salah satu fungsi partai politik. Rekrutmen politik dapat diartikan sebagai suatu proses mencari dan mengajak anggota yang memiliki minat, keterampilan dan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam perpolitikan nasional. Melalui proses rekrutmen, partai politik akhirnya memiliki anggota baik perempuan maupun laki-laki yang akan dipersiapkan dalam rangkaian proses kaderisasi untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas.

Pada dasarnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sikka. Namun kenyataannya, persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Sikka belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik di wilayah Kabupaten Sikka belum optimal.

Pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai politik pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan yaitu penerimaan anggota, pelatihan dan pembinaan kader dan penugasan kader dalam jabatan-jabatan strategis partai.

3.3. Upaya Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka

Dalam upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka, berikut beberapa hal yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka antara lain :

1. Melakukan pendekatan dan pemberdayaan pada kaum perempuan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui sinergitas bersama KPU Kabupaten Sikka dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.
2. Melakukan rapat koordinasi bersama anggota partai terkait dengan mekanisme dan strategi perekrutan anggota partai Perempuan.
3. Melibatkan anggota partai perempuan dalam setiap agenda partai politik.
4. Mengoptimalkan peran fungsi organisasi sayap milik partai politik yang berfokus pada kaum perempuan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Partai politik adalah bagian penting dari masyarakat demokratis. Partai politik juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan dan menyatukan berbagai kepentingan. Salah satu struktur sistem politik yang berada dalam posisi input dan memainkan peran yang sangat penting dalam pergerakan sistem politik adalah partai politik. Pengoperasian sistem politik memberikan kekuatan yang dibutuhkan oleh berbagai tanggung jawab yang dapat diambil partai politik.

Menurut Neumann (Budiardjo, 2008: 403), partai politik adalah organisasi kelompok elit atau aktivis politik yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah dan mendapatkan dukungan rakyat untuk mengontrolnya. Mereka juga mendapatkan dukungan rakyat karena mereka bersaing dengan kelompok lain yang tidak setuju.

Dari pemahaman ini, kita dapat mengatakan bahwa partai politik sejatinya terdiri dari orang-orang yang bersaing dan ingin berkuasa di pemerintahan dengan dukungan rakyat. Pendapat tersebut menyatakan bahwa partai politik harus melakukan fungsinya dengan baik dalam hal rekrutmen politik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bagaimana partai politik, khususnya partai politik, dapat membuat rencana untuk membangun rangkaian di masyarakat untuk merebut kursi legislatif untuk perempuan dalam pemilu tahun 2024.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan juga analisis yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan strategi partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka, berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu meskipun undang-undang telah mengamanatkan semua partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, ini tidak berarti bahwa upaya yang dilakukan oleh partai politik tidak menemukan hambatan. Partai politik menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan selama proses pemilihan umum yaitu rendahnya ketertarikan Perempuan pada politik, kemampuan ekonomi para politisi Perempuan dan proses rekrutmen serta kaderisasi partai politik. Upaya yang dilakukan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sikka antara lain melakukan pendekatan dan pemberdayaan pada kaum perempuan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui sinergitas bersama KPU Kabupaten Sikka dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka, melakukan rapat koordinasi dan evaluasi bersama partai terkait dengan mekanisme dan strategi perekrutan anggota partai Perempuan, melibatkan anggota partai perempuan dalam setiap agenda partai politik, mengoptimalkan peran fungsi organisasi sayap milik partai politik yang berfokus pada kaum perempuan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki banyak keterbatasan. Diantaranya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian yang hanya berlangsung selama dua minggu, sehingga penulis sedikit terkendala untuk menemui informan yang tidak setiap saat berada di tempat kerjanya.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa upaya partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka belum optimal. Selain itu juga, tingkat ketertarikan kaum Perempuan pada ranah politik masih sangat rendah. Oleh karena itu melalui penelitian ini, diharapkan partai politik dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan keterwakilan perempuan di politik sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu juga, sebagai acuan bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Sikka dan jajarannya, Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia dan jajarannya, Ketua DPD Partai Golongan Karya dan jajarannya, Ibu Florensia Klowe sebagai anggota DPRD Perempuan Kabupaten Sikka periode 2019-2024, serta kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung penulis dengan memberikan informasi, ruang dan kesempatan melaksanakan penelitian sehingga dapat berjalan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, H. S. (2023). *Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Kasus Desa Di Kabupaten Nganjuk* http://eprints.ipdn.ac.id/13395/1/Repository_Hafidh.pdf
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Pers.
- Handayono. (2017) *Pendidikan Politik*. Pohon Cahaya.
- Hiplunudin, A. (2017). *Politik Gender*. Yogyakarta : Calpulis
- Kedu, L.D. (2023). *Strategi Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada Pada Pemilu 2024 (Studi Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024* http://eprints.ipdn.ac.id/14301/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20%28LOISA_30.1142_%28STRATEGI%20PARTAI%20POLITIK%20UNTUK%20MEINGKATKAN%20KETERWAKILAN%20PEREMPUAN%20DI%20DPRD%20KABUPATEN%20NGADA%20PROVINSI%20NTT%20PADA%20PEMILU%20TAHUN%202024%29.pdf
- Lestari Yuni, dkk. (2019). *Formulasi strategi partisipasi politik dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan pada pemilu 2019 (PDF) Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 | Agus Prastyawan - Academia.edu*
- Madur, M.T. (2022). *Politik Dan Perempuan (Studi Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)*. <http://eprints.ipdn.ac.id/9912/1/Repository%20Skripsi%20Maria%20Theresia%20Ngingandang%20Madur.%202023.%20A3.%20PIT.%20POLPEM.pdf>
- Setiawan, dkk. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* : Alfabeta
- Suradinata, Ermaya. 2013, *Analisis Kepemimpinan – Strategi Pengambilan Keputusan* Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Zonggonao, Y. (2023). *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah*

[STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI SUKU MONI DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH - Repository IPDN](#)

